
ALASAN PEMERINTAH INDONESIA TIDAK MEMPERPANJANG KONTRAK TOTAL E&P INDONESIA (TEPI) DAN INPEX CORPORATION DI BLOK MAHAKAM PADA TAHUN 2015

Sitti Tiara Febriyanti¹

Abstract: *This study aims to analyze the reasons why the Indonesian government did not renew the contract of Total E&P Indonesia (TEPI) and Inpex Corporation in the Mahakam Block in 2015. The data used are primary data types obtained by the writer through direct interviews and secondary data obtained by the writer through the literature review from books, journals and internet access that contains data and relevant information to the research. The results showed that the bureaucratic actors which are Minister of Energy and Mineral Resources, Commission VII DPR RI, the Special Task Force for the Implementation of Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK MIGAS) give consideration to influence President Joko Widodo's decision regarding the Mahakam Block contract. However, President Joko Widodo's decision has different reasons and considerations from the inputs and considerations presented by some bureaucratic actors. President Joko Widodo's decision is based on considerations of national energy security and security, saving foreign exchange, increasing dividends for the country, domestic political stability and for the formation of an image that is not pro to foreign parties.*

Keywords: *Indonesian Government, Total E&P Indonesia (TEPI), Inpex Corporation, Mahakam Block*

Pendahuluan

Blok Mahakam merupakan lapangan minyak dan gas bumi yang terletak di delta sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Luas wilayah Blok Mahakam adalah 2.883,91 km². Secara geografis, delta Mahakam berada di 117 15'-117 45' Bujur Timur serta 00 15'-01 00' Lintang Selatan. Secara administratif, Blok Mahakam masuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (KUKAR) yang mencakup lima kecamatan, yakni Muara Jawa, Samboja, Muara Badak, Sanga-Sanga dan Anggana. (Achmad Krisna Hadiyanto et.al, 2017)

Blok Mahakam dikelola oleh dua perusahaan minyak dan gas multinasional yaitu *Total E&P Indonesia* (TEPI) dari Perancis dan *INPEX Corporation* dari Jepang. Kontrak Kerjasama (KKS) pengelolaan Blok Mahakam oleh TEPI dan INPEX dimulai sejak 31 Maret 1967 dan berlaku selama 30 tahun. (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015) Kemudian, kontrak tersebut diperpanjang pada tahun 1997 untuk jangka waktu 20 tahun sampai tahun 2017. (David Pratama, 2013)

Kegiatan eksplorasi Blok Mahakam mulai dilakukan sejak tahun 1967 dan kemudian menemukan cadangan minyak dan gas bumi yang cukup besar di tahun 1972. Cadangan awal yang ditemukan saat itu sebesar 1,68 miliar barel per hari (bph) minyak dan gas bumi sebesar 21,2 *triliun cubic feet* (tcf). Dari penemuan itu maka Blok Mahakam mulai melakukan kegiatan produksi pada tahun 1974. (David Pratama, 2013)

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: stiaraf@gmail.com.

Produksi dan pengurusan secara besar-besaran cadangan tersebut menjadikan Indonesia sebagai eksportir *Liquid Natural Gas* (LNG) terbesar di dunia pada tahun 1980 - 2000. Setelah eksploitasi sejak tahun 1974 hingga tahun 2012, sisa cadangan 2P (*proven probable*) minyak diperkirakan tersisa sebesar 185 juta barel dan cadangan gas sebesar 5,7 TCF. (David Pratama, 2013)

Pada tanggal 21 Januari 2008, TEPI mengajukan permohonan perpanjangan kontrak pengelolaan Blok Mahakam kepada pemerintah Indonesia melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro. (David Pratama, 2013) Pengajuan permohonan oleh TEPI ini didasarkan pada kekhawatiran TEPI terhadap kontrak memasok gas untuk *Western Buyers* yang telah diperpanjang hingga tahun 2020 atau tiga tahun setelah kontrak pengelolaan Blok Mahakam oleh TEPI berakhir. *Western Buyers* adalah sebutan untuk 6 perusahaan Jepang yaitu *Chubu Electric Power Co, Kansai Electric Power Co, Kyushu Electric Power Co, Nippon Steel Co Ltd, Osaka Gas Co Ltd dan Toho Gas Co Ltd*. (Investor Daily, 2011)

Selain permintaan dari manajemen TEPI, Perdana Menteri Perancis, Francois Fillon juga telah meminta perpanjangan kontrak Blok Mahakam pada kunjungannya ke Jakarta 1 Juli 2011. Kemudian, permintaan tersebut disampaikan kembali oleh Menteri Perdagangan Luar Negeri Perancis, Nicole Bricq ketika kunjungan Menteri ESDM, Jero Wacik ke Perancis pada 23-24 Juli 2012. (Marwan Batubara, 2014)

Pada tanggal 4 September 2009, Pertamina melalui Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan yang menjabat sejak 5 Februari 2009 menyatakan kepada Menteri ESDM minat untuk mengelola Blok Mahakam. (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015) Minat ini disampaikan sesuai dengan PP No. 35 Tahun 2004 tentang kegiatan hulu migas yang menyatakan bahwa perusahaan negara dalam hal ini Pertamina dapat mengajukan permohonan pengelolaan kepada Menteri ESDM untuk Wilayah Kerja yang akan habis masa kontraknya.

Pertamina berkeyakinan bahwa meskipun Blok Mahakam merupakan Blok yang memiliki kesulitan cukup tinggi untuk dikelola karena selain memiliki wilayah operasi di darat atau *onshore*, Blok Mahakam juga memiliki wilayah operasi lepas pantai atau biasa disebut *offshore*, namun Pertamina meyakini telah memiliki kemampuan secara teknis dan finansial untuk mengelola Blok Mahakam. Penegasan kembali kesiapan Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam tertuang dalam surat resmi Pertamina oleh Plt. Direktur Utama Pertamina yang dikirimkan kepada Menteri ESDM, Sudirman Said pada tanggal 27 November 2014. (Pertamina, 2014)

Keputusan pemerintah Indonesia mengenai pengelolaan Blok Mahakam akhirnya dikeluarkan pada 14 April 2015 melalui Surat Menteri ESDM, Sudirman Said, Nomor 2793/13/MEM.M/2015, perihal Pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Mahakam Pasca 2017. Keputusan tersebut menyatakan bahwa Kontrak Kerja Sama (KKS) WK Mahakam dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) TEPI dan INPEX dengan operator TEPI tidak diperpanjang dan Pertamina ditunjuk sebagai pengelola WK Mahakam pasca berakhirnya KKS tersebut. (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2016)

Keputusan pemerintah terkait pengelolaan Blok Mahakam ternyata tidak sepenuhnya dinilai sebagai keputusan yang tepat. Terdapat beberapa permasalahan pada keputusan ini, diantaranya sebagai berikut. Muncul respon negatif yang disampaikan oleh berbagai pihak di antaranya disampaikan oleh Direktur Pertamina sebelum Karen Agustiawan yaitu Ari Soemarno yang menyatakan bahwa akan lebih baik jika Blok Mahakam tetap dikelola bersama dengan TEPI dikarenakan menurutnya Pertamina tidak

mampu mengelola Blok Mahakam sendiri. (Donatus Fernanda Putra dan Diemas Kresna, 2015)

Ketidakmampuan tersebut dinilai Ari terlihat dari bidang G&G (*geological* dan *geophysical*) yang masih sangat lemah. Kemampuan di bidang ini diperlukan guna melakukan eksplorasi untuk pengembangan lapangan minyak dan gas di Blok Mahakam. (Direktoral Jenderal Kekayaan Negara, 2013) Kemudian, Ari Soemarno berpendapat bahwa Pertamina belum memiliki kemampuan manajerial dan teknologi maka sebaiknya Pertamina bekerjasama terlebih dahulu dengan TEPI dalam pengelolaan Blok Mahakam agar bisa memiliki kemampuan manajerial seperti TEPI di Blok Mahakam. (Marwan Batubara, 2014)

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewi Aryani juga menyatakan bahwa sebaiknya dilakukan pengelolaan bersama antara PT Pertamina dan TEPI. Dewi Aryani menilai bahwa Pertamina mampu untuk mengelola Blok Mahakam dari sisi finansial namun agak lemah dari sisi teknologi dan manajemen pengelolaan lapangan. (Direktoral Jenderal Kekayaan Negara, 2013)

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Pertamina belum mampu untuk mengelola Blok Mahakam sendiri dan sebaiknya tetap bekerjasama dengan TEPI dan INPEX dalam mengelola Blok Mahakam. Namun, pemerintah Indonesia tetap tidak memperpanjang kontrak TEPI dan INPEX di Blok Mahakam dan justru memberikan hak pengelolaan 100% pada PHM.

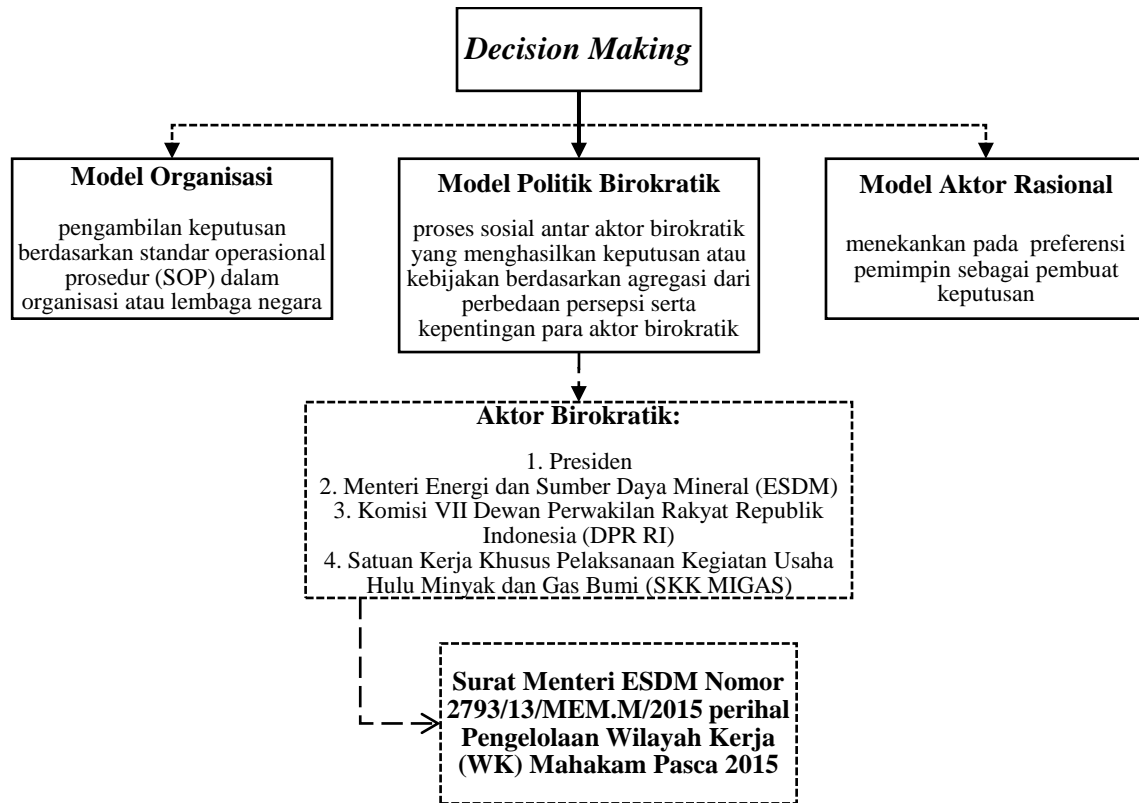
Karena masalah inilah, penulis tertarik untuk meneliti alasan yang mendorong pemerintah Indonesia membuat keputusan tidak memperpanjang kontrak *Total E&P Indonesia* (TEPI) dan *INPEX Corporation* di Blok Mahakam pada tahun 2015.

Kerangka Teori

Teori *Decision Making*

Dalam perspektif *Decision Making Process*, Graham T Allison mengajukan tiga model yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri negara, yaitu Model Aktor Rasional, Model Proses Organisasi, dan Model Politik Birokratik. Model aktor rasional memandang bahwa politik luar negeri merupakan akibat dari kesengajaan tindakan-tindakan aktor rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut model aktor rasional, pembentukan keputusan politik luar negeri merupakan proses intelektual. (Mohtar Mas'ood, 1990) Model proses organisasi menggambarkan politik luar negeri merupakan hasil kerja suatu organisasi besar yang berfungsi menurut suatu pola perilaku. Pembuatan keputusan luar negeri dipandang bukan merupakan proses intelektual, tetapi lebih merupakan proses mekanis. Proses mekanis yang dimaksud adalah proses yang mengacu pada keputusan-keputusan yang telah dibuat di masa lalu, prosedur rutin yang berlaku, atau pada peran yang ditetapkan bagi unit birokrasi tersebut. (Mohtar Mas'ood, 1990) Model Politik Birokratik memandang bahwa politik luar negeri merupakan hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan serta melalui berbagai proses tawar-menawar (*bargaining games*) di antara berbagai aktor dalam birokrasi dan kancah politik nasional. Dengan kata lain, pembuatan keputusan politik luar negeri adalah proses sosial, bukan proses intelektual. (Mohtar Mas'ood, 1990) Dalam penelitian ini, penulis mengambil model politik birokratik untuk menjelaskan dan menjawab rumusan masalah. Berikut alur berpikir yang digunakan:

Diagram Alur Berpikir Teori *Decision Making*



Sumber: Diadaptasi dari P. Antonius Sitepu, 2011

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan metodologi penelitian eksplanatif, yaitu menjelaskan secara jelas dan konkrit mengenai alasan pemerintah Indonesia tidak memperpanjang kontrak Total E&P Indonesia (TEPI) dan INPEX Corporation di Blok Mahakam pada tahun 2015. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari sumber-sumber pertama seperti pengamatan langsung di lapangan, *interview*, dokumen dan *press release* serta data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, majalah, tabloid, jurnal, internet dan jenis data sekunder lain yang saling berkaitan dan dapat menjelaskan fenomena yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Alasan pemerintah Indonesia tidak memperpanjang kontrak Total E&P Indonesia (TEPI) dan INPEX di Blok Mahakam dipengaruhi oleh perbedaan pertimbangan aktor-aktor birokratik Indonesia yang terlibat di dalamnya yaitu DPR RI, SKK Migas, presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM. Perbedaan pertimbangan ini dilatarbelakangi oleh perbedaan persepsi dan kepentingan masing-masing aktor tersebut. Namun, dikarenakan Joko Widodo selaku Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi maka keputusan terkait Blok Mahakam ditetapkan oleh Joko Widodo.

A. Pertimbangan Komisi VII DPR RI Mengenai Kedaulatan Energi

Komisi VII DPR RI merupakan satu dari sebelas komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi dan lingkungan hidup. (DPR RI, 2016) Di internal Komisi VII DPR RI, terdapat beberapa pihak yang secara tegas menyatakan

dukungannya kepada Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam. Salah satunya yaitu pernyataan dari Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Zainuddin Amali dari Fraksi Golkar. Beliau berpendapat bahwa sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”, maka seharusnya hak pengelolaan Blok Mahakam diserahkan kepada Pertamina. Amali berpendapat bahwa setelah tahun 2017, kontrak TEPI dan INPEX tidak perlu perpanjangan, tetapi Indonesia harus tetap menaati dan melaksanakan hingga kontrak berakhir. (Marwan Batubara, 2014)

Kemudian, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN, Chandra Tirta Wijaya juga mendukung Pertamina dan mendesak agar pemerintah dapat segera membuat keputusan perihal Blok Mahakam dan tidak melanjutkan kontrak dengan Total karena Chandra menentang dominasi pihak asing dalam pengelolaan Blok migas di Indonesia. Menurutnya, sikap pemerintah yang lamban dalam mengambil keputusan dapat menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa pemerintah berniat memperpanjang kontrak dengan Total. (Marwan Batubara, 2014)

Pendapat selanjutnya dikemukakan anggota komisi VII DPR Fraksi PKS, Muhammad Idris Luthfi yang menyatakan bahwa pemerintah harus menolak skema masa transisi yang diusulkan oleh TEPI dimana TEPI tetap sebagai operator. Luthfi menyarankan agar dalam masa transisi, Pertamina yang berwenang sebagai operator dan memiliki saham mayoritas, misalnya 70%. (Marwan Batubara, 2014)

Pendapat-pendapat diatas berbeda dengan pendapat sebagian anggota Komisi VII DPR RI yang beranggapan bahwa Pertamina belum mampu dari sisi teknologi dan manajemen pengelolaan lapangan. Namun, anggapan ketidakmampuan tersebut dinilai kurang tepat jika melihat fakta keberhasilan Pertamina dalam mengelola Blok yang memiliki profil operasi mirip dengan Blok Mahakam yaitu Blok *Offshore North West Java* (ONWJ).

Blok ONWJ merupakan blok yang dulunya dikelola oleh *British Petroleum*. Blok ONWJ dan Blok Mahakam sama-sama beroperasi di lepas pantai, memiliki fasilitas produksi yang mirip dan kedalaman yang hampir sama, hanya berbeda dari karakter lapisan cadangannya.

Tabel 1 Perbandingan Blok ONWJ dengan Blok Mahakam

No	Blok ONWJ	Blok Mahakam
1	Beroperasi di lepas pantai / <i>offshore</i>	Beroperasi di lepas pantai / <i>offshore</i>
2	Kedalaman laut 8-40 m	Kedalaman laut 2-50 m
3	Memiliki pipa bawah laut (<i>subsea pipeline</i>)	Memiliki jaringan pipa bawah laut (<i>subsea pipeline</i>) dan jaringan pipa darat (<i>onshore pipeline</i>)

Sumber: Marwan Batubara. 2014.

Setelah kontrak pengelolaan *British Petroleum* di Blok ONWJ berakhir pada tahun 2009 dan diambil alih pengelolalaannya oleh Pertamina Hulu Energi (PHE) yang merupakan anak perusahaan Pertamina, produksi Blok ONWJ kian mengalami peningkatan meskipun di tahun awal pengelolalaannya mengalami penurunan yaitu 17.400 barel per hari (bph) jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 22.000-23.000 bph. (Pertamina, 2015)

Tabel 2 Perbandingan Produksi Blok ONWJ oleh British Petroleum dan Pertamina

TAHUN	2017	2008	2009	2010	2011
Pertamina Hulu Energi	-	-	-	17.400 bph	32.200 bph
British Petroleum	22.000-23.000 bph			-	-

Sumber: *Pertamina, 2015*

Kemudian, pada tahun 2011 produksi minyak mengalami peningkatan menjadi 32.200 bph. Selanjutnya di tahun 2012 menjadi 34.000 bph. Kinerja produksi Blok ONWJ terus meningkat pada tahun 2013 ke angka 38.300 bph, dan ketika akhir tahun 2014 produksi mencapai 40.500 bph. ([Pertamina, 2015](#))

Selain peningkatan produksi minyak, produksi gas di Blok ONWJ juga mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2010-2011 stabil yaitu 172,7 MMSCFD. Lalu tahun 2013 meningkat menjadi 181 MMSCFD dan di akhir tahun 2014 meningkat ke angka 186 MMSCFD. ([Pertamina, 2015](#))

Komisi VII DPR RI telah mengundang pihak eksekutif seperti Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, BP Migas/SKK Migas dan Pertamina untuk mendengar pendapat dari masing-masing pihak perihal permasalahan kontrak pengelolaan Blok Mahakam. Lalu, dilakukan pula rapat audiensi antara petitor petisi Blok Mahakam untuk rakyat bersama dengan pimpinan DPR RI. Namun, meskipun telah beberapa kali dilaksanakan rapat audiensi, DPR RI tidak kunjung menghasilkan keputusan dan pernyataan sikap terkait Blok Mahakam. ([Marwan Batubara, 2014](#))

Menyikapi tidak kunjungnya dikeluarkan keputusan terkait Blok Mahakam, muncul respon dari berbagai pihak diluar lembaga pemerintahan yaitu Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), IRESS (*Indonesian Resources Studies*), Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KPSMI), ormas-ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta sejumlah tokoh nasional. Tindakan yang dilakukan untuk mendukung Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam yaitu melakukan unjuk rasa, advokasi, melakukan audiensi dengan DPR RI, menulis surat kepada Presiden SBY, menggalang dan menerbitkan petisi Blok Mahakam serta menyampaikan pengaduan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). ([Marwan Batubara, 2014](#))

IRESS (*Indonesian Resources Studies*) sebagai salah satu Petitor Blok Mahakam telah mengirimkan surat yang berisikan Petisi Blok Mahakam untuk rakyat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui kementerian sekretariat negara pada 17 Oktober 2012. Di tahun 2013, IRESS kembali memberikan surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada tahun 2014, IRESS bertemu dengan Staff Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Profesor Firmanzah PhD untuk membahas kemungkinan penyampaian surat tertutup kepada Presiden. Profesor Firmanzah menyampaikan bahwa bersedia menyampaikan aspirasi petitor Petisi Mahakam kepada Presiden. Namun, Profesor Firmanzah menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan birokrasi istana yang belaku, surat tersebut harus ditembuskan ke kementerian terkait yaitu kementerian ESDM untuk dibahas terlebih dahulu sebelum diteruskan ke Presiden.

Namun surat tersebut tidak mendapatkan jawaban dari Presiden dan hingga akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemerintah Indonesia belum juga

mengeluarkan keputusan perihal pengelolaan Blok Mahakam. Keputusan perihal alih kelola Blok Mahakam tidak kunjung dikeluarkan dikarenakan proses negosiasi dan perbedaan pendapat yang terjadi di dalam pemerintahan dan lembaga terkait.

B. Pertimbangan oleh Presiden Joko Widodo

Sebagai aset migas nasional, Blok Mahakam berperan sebagai penopang ketahanan dan keamanan energi di Indonesia. Keamanan energi merupakan salah satu aspek dari ketahanan energi. Keamanan energi ialah jaminan terhadap kebutuhan energi nasional jangka panjang. Aspek kedua dari ketahanan energi yaitu kemandirian energi yang merupakan kemampuan menggunakan sumberdaya dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. (Angga Nurdin Rahmat, 2018)

Sebelum keputusan alih kelola Blok Mahakam dikeluarkan, pemerintah Indonesia membutuhkan waktu hingga 7 tahun untuk melakukan pertimbangan terkait pengelolaan Blok Mahakam pasca berakhirnya K3S dengan TEPI dan INPEX. Mulai dari masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008 ketika TEPI pertama kali mengajukan permintaan perpanjangan kontrak pengelolaan Blok Mahakam hingga kepemimpinan presiden Joko Widodo. Pada akhir masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah Indonesia tidak kunjung mengeluarkan keputusan terkait pengelolaan Blok Mahakam.

Setelah Joko Widodo menjabat sebagai presiden, alih Kelola Blok Mahakam masih terus dibahas untuk menghasilkan sebuah keputusan. Upaya advokasi terus dilakukan oleh pihak-pihak yang mendukung Pertamina untuk segera diberikan hak mengelola Blok Mahakam. Jika Joko Widodo tidak segera memutuskan kontrak pengelolaan Blok Mahakam dengan TEPI dan INPEX, diperkirakan upaya advokasi akan terus dilakukan dan hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada stabilitas politik nasional.

Pada Jum'at, 15 April 2015 Presiden Joko Widodo ditemui *Total Grup Chief Executif Officer* (CEO) Patrick Pouyanne, *President of Total E&P* Armand Breuillac, *Senior VP Asia Africa Total E&P* Olivier de Langavant dan *President and GM Total E&P Indonesia* Hardy Pramono untuk membahas Blok Mahakam. Pada pertemuan tersebut, pihak Total menyatakan komitmennya untuk terus berinvestasi di Indonesia. (Resty Armenia, 2015)

Pasca pertemuan ini, Presiden Joko Widodo memberikan waktu satu bulan kepada Menteri ESDM untuk memberikan rekomendasi perihal Blok Mahakam. Presiden berpesan agar ada kesepakatan yang saling menguntungkan, yang memberikan kesempatan Total untuk terus beroperasi dan Pertamina menjadi operator pada waktunya.

Menteri ESDM menyerahkan rekomendasi final mengenai pengelolaan Blok Mahakam kepada Presiden Joko Widodo pada Senin, 15 Juni 2015. Rekomendasi ini telah berdasarkan hasil diskusi dengan pihak TEPI, INPEX dan PT Pertamina. Namun, tidak diungkapkan secara detail apa dan bagaimana isi rekomendasi tersebut. (Diemas Kresna Duta, 2015)

Meski tidak dipaparkan perihal isi detail rekomendasi, Direktur Program Pengusahaan Hulu Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengungkapkan instansinya merekomendasikan Pertamina menjadi pemegang hak partisipasi secara mayoritas, sementara Total dan INPEX dipersilahkan untuk tetap berada di Blok Mahakam dengan menjalin Kerjasama secara *Business to Business (B to B)* dengan Pertamina.

Akhirnya, Presiden Joko Widodo melalui Kementerian ESDM mengumumkan keputusan final pemerintah Indonesia perihal Blok Mahakam pada Jum'at, 19 Juni 2015

di lobi Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Menteri ESDM Sudirman Said secara resmi mengeluarkan keputusan perihal alih kelola Blok Mahakam pada tahun 2015. Keputusan ini tertuang dalam Surat Menteri ESDM No. 2793/13/MEM.M/2015 perihal pengelolaan wilayah kerja (WK) Mahakam pasca 2017.

Pertamina melalui cucu perusahaannya, PT Pertamina Hulu Mahakam resmi memperoleh hak pengelolaan Blok Mahakam. Secara politis, keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo perihal pengelolaan Blok Mahakam memberikan keuntungan yaitu Presiden mendapatkan citra yang baik karena dinilai menolak liberalisasi migas. Kebijakan tidak memperpanjang kontrak TEPI dan INPEX di Blok Mahakam dan menyerahkan pengelolaan 100% kepada Pertamina juga secara tidak langsung menepis isu yang sempat ditujukan kepada Jokowi pada masa pilpres 2014 yaitu isu bahwa Joko Widodo merupakan sosok yang pro terhadap pihak asing.

Pada studi kasus ini, posisi Pemerintah Indonesia jauh lebih kuat dibanding TEPI dan INPEX selaku perusahaan asing yang berasal dari Perancis dan Jepang. Hal ini dikarenakan Blok Mahakam merupakan SDA milik Indonesia dan segala kerjasama pengelolaannya diatur berdasarkan Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo cenderung membuat keputusan yang dapat memberikan keuntungan yang paling besar bagi negara yaitu dengan memberikan pengelolaan Blok Mahakam 100% kepada Pertamina yang merupakan *national oil company*.

Pemerintah Indonesia tetap tidak memberikan perpanjangan kontrak kepada TEPI dan INPEX namun menyarankan agar TEPI dan INPEX untuk melakukan kerjasama secara *business to business* dengan Pertamina jika tetap ingin terlibat dalam pengelolaan Blok Mahakam.

Jika dilihat dari berbagai aspek, keputusan pemerintah Indonesia ini tetap dinilai sangat rasional. Sebuah keputusan dapat disebut rasional jika keputusan tersebut diambil setelah membandingkan alternatif yang paling menguntungkan atau minimal yang memiliki kerugian paling kecil.

Dari segi sumber daya manusia (SDM) yang mengelola Blok Mahakam sejak masa pengelolaan oleh TEPI mayoritas ialah SDM lokal Indonesia. Bila pengelolaan Blok Mahakam beralih ke Pertamina, hampir seluruh SDM yang telah berpengalaman dan handal untuk mengelola Blok Mahakam ini telah menyetujui untuk bergabung kembali mengelola Blok Mahakam.

Dari segi pembagian keuntungan. Jika dikelola oleh NOC maka dapat meningkatkan pembagian keuntungan sehingga mendapat penambahan pendapatan bagi negara. Kemudian, pengelolaan oleh NOC akan meningkatkan kedaulatan dan ketahanan energi. Dengan dikelola oleh Pertamina, maka hasil minyak dan gas bumi tidak lagi perlu dibagi dengan pihak asing namun dapat digunakan seluruhnya bagi kebutuhan dalam negeri. Lalu, dapat meningkatkan nilai asset bagi Pertamina dan memperluas lingkup pekerjaan Pertamina sehingga dapat terjadi proses percepatan bagi Pertamina untuk masuk dalam kategori perusahaan kelas dunia.

Maka, setelah dilihat dari berbagai aspek seperti aspek kualitatif, konstitusi, kemandirian, ketahanan energi dan kepentingan strategis nasional serta aspek ekonomi dan keuangan, pengelolaan Blok Mahakam oleh Pertamina akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar bagi negara. Sehingga dinilai merupakan keputusan yang rasional bagi Presiden Joko Widodo untuk membuat keputusan menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina.

Tabel 3 Perbandingan Keuntungan Negara dalam Pengelolaan Blok Mahakam oleh Pertamina Selaku BUMN dan TEPI & INPEX Selaku Perusahaan Asing

No	Jenis Pendapatan	BUMN	Perusahaan Asing	Keterangan
1	Pajak	Sama	Sama	Berkurang jika asing memark-up biaya dan menggelapkan pajak
2	Bagi Hasil	Sama	Sama	Berkurang jika asing memark-up biaya dan menggelapkan pajak
3	Cost Recovery	Lebih Kecil	Lebih Besar	Tren asing menggunakan produk dan jasa negara asal
4	Deviden	Besar	Nol	Keuntungan dibawa ke negara asal perusahaan asing
5	CSR	Lebih Besar	Lebih Kecil	Asing cenderung tidak optimal
6	Keuntungan Negara	Lebih Besar	Lebih Kecil	BUMN: sesuai konstitusi, kebutuhan ketahanan energi, dll

Sumber: Sumber: Buku karya Marwan Batubara. 2014. "Kembalikan Blok Mahakam". Jakarta: Indonesian Resources Studies.

Kesimpulan

Keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak memperpanjang kontrak pengelolaan Blok Mahakam oleh TEPI dan INPEX dan menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam ke Pertamina yang merupakan *national oil company* dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2015. Sebelum mengeluarkan keputusannya, Joko Widodo selaku pembuat keputusan dipengaruhi oleh pertimbangan aktor birokratik yang terlibat dalam kasus yang penulis teliti yaitu SKK Migas, Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM. Dari ketiga pemikiran yang muncul dari lembaga-lembaga tersebut, Joko Widodo selaku presiden dan pembuat keputusan dalam kasus yang penulis teliti lebih condong dilatarbelakangi oleh kepentingan politis yaitu pembentukan citra yang tidak pro terhadap pihak asing, mengamankan stabilitas politik nasional, penghematan devisa, meningkatkan deviden bagi negara serta pertimbangan keamanan dan kedaulatan energi nasional. Jadi, meskipun penyerahan Blok Mahakam kepada Pertamina selaras dengan masukan yang disampaikan oleh sebagian anggota Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM, namun keputusan Joko Widodo memiliki alasan dan pertimbangan yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Batubara, Marwan. 2014. *Kembalikan Mahakam – Memang Hak Kami*. Jakarta: *Indonesian Resourches Studies (IRESS)*.
- Hadiyanto, Achmad Krisna, dkk. 2017. *Total E&P Indonesia : 5 Dekade Mengembangkan Blok Mahakam*. Jakarta: PT Centro Inti Media.
- Mas' oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Sitepu, Antonius P. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ambaranie Nadia Kemala Movanita. 2015. "Kasus Pemerasan di Kementerian ESDM, KPK Periksa Jero Wacik" tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/05/11093871/Kasus.Pemerasan.di.Kementerian.ESDM.KP-K.Periksa.Jero.Wacik>.
- Armenia, Resty. 2015. "*Jokowi Belum Tutup Peluang Total Terlibat di Blok Mah akam*" tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150515175009-85-53499/jokowi-belum-tutup-peluang-total-terlibat-di-blok-mahakam>
- Bisnis Indonesia. 2012. "Karen: Pertamina Sanggup Kelola Blok Mahakam" tersedia di <http://industri.bisnis.com/read/20120722/44/87241/karen-pertamina-sanggup-kelola-blok-mahakam>
- BBC. 2014. "Rudi Rubiandini Divonis 7 Tahun Penjara", tersedia di https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/04/140429_rudi_vonis
- M Daeng, Dano Akbar. 2018. "Lika liku blok Mahakam Sebelum Jatuh ke Tangan Pertamina" tersedia di <https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/lika-liku-blok-mahakam-sebelum-jatuh-ke-tangan-pertamina-cCyM>
- Detik Finance. 2013. "Pertamina Ingin Kuasai Blok Mahakam, Ini Pesan Jero Wacik" tersedia di <http://finance.detik.com/read/2013/04/04/142610/2211524/1034/pertamina-ingin-kuasai-blok-mahakam-ini-pesan-jero-wacik>
- Detik Finance. 2014. "Wamen ESDM: Blok Mahakam Belum Tentu Diberi ke Pertamina" tersedia di <http://finance.detik.com/read/2014/05/22/193152/2590039/4/wamen-esdm-blok-mahakam-belum-tentu-diberi-ke-pertamina>
- Direktoral Jenderal Kekayaan Negara. 2013. "DPR Minta Blok Mahakam Diminta Dikelola Bersama" tersedia di https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/2379/DPR-Minta-Blok-Mahakam-Diminta-Dikelola-Bersama.html
- DPR RI. 2016. "Tentang Komisi VII DPR" tersedia di <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-VII>
- Direktoral Jenderal Kekayaan Negara. 2013. "Kelola Blok Mahakam, Pertamina Dinilai Masih Lemah" tersedia di https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/2365/Kelola-Blok-Mahakam-Pertamina-DinilaiMasih-Lemah.html
- Duta, Diemas Kresna. 2015. "Rekomendasi Final Nasib Blok Mahakam Mendarat di Meja Jokowi" tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150617143459-85-60596/rekomendasi-final-nasib-blok-mahakam-mendarat-di-meja-jokowi>
- Hardani Triyoga. 2016. "Jero Wacik Divonis 4 Tahun Penjara dan Wajib Kembalikan Rp 5 Miliar ke Negara", tersedia di <https://news.detik.com/berita/d-3137862/jero-wacik-divonis-4-tahun-penjara-dan-wajib-kembalikan-rp-5-miliar-ke-negara>
- Investor Daily. 2011. "Kontrak Gas ke Jepang Diperpanjang" tersedia di <https://id.beritasatu.com/energy/kontrak-gas-ke-jepang-diperpanjang/4079>

- Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Sujatmiko. “Siaran Pers: Kunjungi Blok Mahakam, MESDM Pantau Transisi Pengelolaan ke Pertamina” tersedia di <https://migas.esdm.go.id/post/read.siaran-pers—kunjungi-blok-mahakam-mesdm-pantai-transisi-pengelolaan-ke-pertamina>
- Pertamina. 2014. “Pertamina Tegaskan Kesiapan Mengelola Blok Mahakam Kepada Pemerintah” tersedia di <https://www.pertamina.com/en/viewarchive/ve/news-release/pertamina-tegaskan-kesiapan-mengelola-blok-mahakam-kepada-pemerintah>
- Pertamina. “Sejarah Pertamina” tersedia di <https://www.pertamina.com.id/sejarah-pertamina>
- Pertamina. 2018. “1 Januari 2018, Pertamina Resmi Kelola Blok Mahakam” tersedia di <http://www.pertamina.com/en/viewarchive/news-release/1-januari-2018-pertamina-resmi-kelola-blok-mahakam>
- Pertamina. 2022. “PHE ONWJ: Tetap Tangguh Meski Harga Minyak Jatuh”, tersedia di <https://www.pertamina.com/id/news-room/energia-news/phe-onwj-tetap-tangguh-meski-harga-minyak-jatuh>
- Pratama, David. 2013. “Data dan fakta seputar blok Mahakam” terdapat di https://www.skkmigas.go.id/berita/data_dan_fakta_seputar_blok_mahakam
- Putra, Donatus Fernanda dan Diemas Kresna. 2015. “Pemerintah Tak Restui Pertamina Kuasai Blok Mahakam?” tersedia di <https://m.cnnindonesia.com/20150307190711-85-37497/pemerintah-tak-restui-pertamina-kuasai-blok-mahakam>
- Suhartono. 2012. “Blok Mahakam Harus Dikelola Bangsa Sendiri” tersedia di <https://sains.kompas.com/read/2012/10/20/19074995/Blok.Mahakam.Harus.Dikelola.Bangsa.Sendiri>
- Tim Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2015. “Kronologis Kontrak Kerja Sama Blok Mahakam” terdapat di <https://migas.esdm.go.id/post/read/kronologis-kontrak-kerja-sama-wk-mahakam>
- Rahmat, Angga Nurdin. 2018. “Indonesia Dalam Pusaran Politik Energi Global”. *Jurnal Indonesian Perspective* Vol. 3 No. 1.
- Romadhon, Topan Meiza. 2009. “Pengaturan *Production Sharing Contract* Dalam Undang-Undang Minyak dan Gas”. *Jurnal Hukum* No.1 Vol.1
- Tribun Kaltim. 2015. “Mengemis di Negeri Sendiri”
- Maulana, Hari. Babak Baru Blok Mahakam. *Energia*. Edisi Januari 2018.
- Ariyati, Ety Syamsiyah. 2010. “Analisis Ketentuan-ketentuan di *Production Sharing Contract* Indonesia dalam Kaitannya Dengan Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi”. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hermanto, Anton Dedi. 2014. “Kajian Yuridis Pelaksanaan *Cost Recovery* Dalam Sistem *Production Sharing Contract* Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010”. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Muliyawati, Risa Bella. 2012. “Manfaat Kerjasama New Asean Strategic Partnership (NASP) Bagi Indonesia”. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Pratiwi, Indah. 2018. “Upaya Pengelolaan Blok Mahakam oleh Pemerintah Kaltim Bersama Pertamina Pasca Kontrak Karya Total 2014-2017”. Samarinda: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

- Shobah, Shofia, Hanif Nur Widhiyanti. 2015. "Cost Recovery Dalam Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Kontrak Internasional". Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. 2014. Info Risiko Fiskal Edisi I Tahun 2014. Jakarta: Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Hal 4.
- Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2015. Renstra KESDM 2015-2019. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Hal 109.
- Rahmanto, Florensus Angg. 2019. Analisa Teknis dan Keekonomian pada Inisiasi Blok dan Aset Migas. Jakarta: Universitas Pertamina.
- Imron, Mochammad dkk. 2016. Laporan Tahunan 2015 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Jakarta: Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Imron, Mochammad, dkk. 2018. Laporan Tahunan Capaian Pembangunan 2018, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.